

ABSTRAK

Ranjau darat telah menjadi momok tersendiri bagi negara-negara pasca konflik. Sebab meskipun peperangan telah usai bertahun-tahun yang lalu, ranjau darat masih tetap aktif hingga berpuluh-puluh tahun setelahnya. Berdasarkan penilitan, membuat ranjau darat hanya membutuhkan dana 1 US dollar/unit, tetapi membasminya membutuhkan lebih dari 1.000 US dollar/unit.

Kampanye Dunia Melawan Ranjau darat yang digalakkan sejak tahun 1997 belum juga berhasil mengajak negara kuat Amerika Serikat untuk bergabung meratifikasi. Amerika Serikat masih termasuk sebagai salah satu dari 13 negara yang belum meratifikasi *Ottawa Process* (konvensi yang menandai dimulainya Kampanye Dunia Melawan Ranjau Darat), sebab mereka masih aktif memproduksi ranjau darat. Amerika Serikat bahkan sudah mengumumkan bahwa mereka akan terus membiayai pengembangan ranjau darat termasuk riset-riset teknologisnya hingga tahun 2013. Tiga rezim sudah berlalu sejak *Ottawa Process* pertama kali dicetuskan dan belum ada satu rezimpun yang berani mengambil keputusan untuk bergabung beratifikasi, mulai dari rezim Bill Clinton, George W. Bush, hingga Barack Obama.

Permasalahannya adalah, terdapat semacam inkonsistensi di kubu Amerika Serikat sendiri. Sebab ditengah-tengah kerasnya mereka bertahan untuk enggan meratifikasi *Ottawa Process* dan terus memproduksi ranjau, ternyata mereka juga mengucurkan tidak kurang dari 600 juta US dollar setiap tahunnya untuk membiayai program *Mine Action Funding*, sebuah bantuan yang diberikan kepada lebih dari 45 negara untuk mengatasi persoalan ranjau darat di negara mereka. Kening dunia mengernyit, bagaimana mungkin Amerika Serikat yang tengah getolnya meneliti dan memproduksi ranjau darat ikut membantu pembasmian ranjau darat yang notabene adalah buatan mereka sendiri?

Skripsi "Inkonsistensi Amerika Serikat dalam menghadapi Kampanye Dunia Melawan Ranjau Darat" ini didedikasikan untuk menelusuri komplikasi, bergelut dengan data-data yang saling bertolak belakang, untuk akhirnya diharapkan bisa memberi sekelumit penjelasan mendasar tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang